

## **TINDAKAN MILITER TURKITERHADAP PARTAI ISLAM DI TURKI**

### **A. PENDAHULUAN**

Pada awal pemerintahannya, Mustafa Kemal mendirikan satu partai yang menjadi penopang dari prinsip-prinsipnya yaitu PRR/Partai Rakyat Republik (*Republican People's Party*). PRR merupakan partai tunggal, dengan demikian memungkinkan Mustafa Kemal mengontrol partai secara langsung untuk melaksanakan reformasinya. Kehidupan politik dengan sistem satu partai ini dialami Turki hingga pertengahan tahun 1940-an, dan kemudian Turki mengalami masa demokrasi dengan mempunyai beberapa buah partai. Hal ini tak lain disebabkan dengan kelonggaran yang diberikan pemerintahan Ismet Inonu-Presiden kedua Turki setelah menggantikan Mustafa Kemal Attaturk yang meninggal pada tahun 1938.

Perkembangan media massa pula yang membuat perkembangan demokrasi di Turki berkembang dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh peraturan pers dan kesatuan pers yang



dikontrol pemerintah dihapuskan pada tahun 1946 sehingga para jurnalis dengan leluasa menulis berita. Hal yang sangat jelas terlihat dari perkembangan kehidupan pers adalah jumlah majalah yang mengalami peningkatan yang begitu pesat, mulai dari jumlah nasional sebanyak 154 buah pada tahun 1945 menjadi 983 pada tahun 1952, dan 1573 (472 harian) pada tahun 1961.<sup>1)</sup> Partai-partai politik yang berdiri setelah PRR hingga terjadinya kudeta pada tahun 1960 antara lain adalah Partai Demokrat (*Democratic Party*), Partai Rakyat (*People's Party*), Partai Pembangunan Nasional (*Party of National Development*), Partai Keadilan Sosial (*Party of Social Justice*), Partai Tani (*The Cultivator Peasant Party*), Partai Pembela Kemurnian (*Party of Purification Protection*), Partai Perlindungan Islam (*Party of Islamic Protection*), dan Partai Konservatif Turki (*Turkish Conservative Partsy*).<sup>2)</sup>

Partai Demokrat (*Democratic Party*) beridiri pada tanggal 7 Januari 1946 yang dipimpin oleh Adnan Menderes.

---

<sup>1)</sup> Kemal H. Kapral, *The Mass Media and Multy Party Life*, Dalam Robert E. Ward dan Dankward A. Rustow (eds), *Political Modernization in Japan and Turkey*, Princenton University Press, New Jersey, 1964, hal.278

<sup>2)</sup> *Ibid*, hat. 235-236

Pers, yang telah memobilisasi opini publik terhadap pemerintahan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Partai Demokrat sehingga partai tersebut memenangkan pemilihan umum pada tahun 1950 dan menduduki tampuk kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya pemerintahan Partai Demokrat menyetujui sebuah undangundang pers liberal sebagai ucapan terima kasih atas dukungan pers yang diterimanya selama beberapa tahun dalam oposisi. Untuk waktu ini dalam sejarah Turki, sebuah pemerintahan telah berubah melalui pemilihan umum yang bebas.

## **B. Keberadaan Militer di Turki**

Militer Turki memandang dirinya sebagai wali negara Turki dengan kewajiban moral dan resmi melindungi Republik Turki terhadap setiap jenis ancaman atau bahaya yang dapat mengancam eksistensi negara. Militer tidak membedakan ancaman internal dan eksternal atau ancaman-ancaman terhadap integritas teritorial negara dan terhadap prinsip-prinsip Mustafa Kemal dalam Konstitusi Turki.

Para perwira militer memandang rendah politik dan

Garth Jenkins, *Context and Circumstances: The Turkish and Politics*, Adelphi Paper No.337, Oxford University Press, Februari 2001, hal. 33



pakar politik, dan memperlihatkan sedikit keinginan untuk menjadi tetap terlibat dalam roda pemerintahan. Meskipun demikian, Republik Turki dibentuk oleh para prajurit militer, Attaturk dengan cepat membedakan antara prajurit dan pakar politik dengan keyakinan bahwa keterlibatan aktif di dalam politik akan merubah militer sebagai sebuah institusi.

Proporsi para prajurit militer dalam parlemen yang sebelumnya sebesar 16 persen pada tahun 1923 menjadi kurang hingga 4 persen pada tahun 1958.<sup>3)</sup> Kaum militer Turki tidak berusaha untuk menyatukan peran para perwira militer ke dalam birokrasi sipil, seperti yang dijalankan militer Indonesia era Orde Baru dengan doktrin Dwifungsinya.

### 1. Kudeta Militer I (1960-1961)

Sejak berdirinya pada tahun 1923 hingga pemilihan umum multi partai pertama tahun 1950, Turki boleh dikatakan dikendalikan oleh para tentara. Namun setelah berkuasanya pemerintahan Adnan Menderes, para perwira

---

<sup>3)</sup> Gareth Jenkins, *Context and Circumstance : The Turkish and Politics*, Adelphi Paper No.337, Oxford University Press, Februari 2001, hal. 33

militer secara aktif terabaikan dalam pembahasan politik dan bahkan dilarang membaca surat kabar, sementara gaji mereka tidak pernah dinaikkan. Partisipasi Turki dalam Perang Korea (1950-1953) telah menambah rasa percaya diri militer. Setelah Turki bergabung dengan NATO pada bulan Februari 1952, para perwira Turki kembali pada garis terdepan perpolitikan Turki.

Hal ini disebabkan mereka melakukan perjalanan ke berbagai tempat dan mengenal teknologi baru dan untuk membedakan peralatan dan metodologi yang digunakan oleh militer asing dengan yang digunakan oleh mereka sendiri. Mereka juga membedakan perilaku para pakar politik di negara-negara Barat dengan apa yang mereka pandang sebagai tindakan buruk dari pemerintah mereka. Hingga pada akhirnya militer tidak lagi menghiraukan pemerintahan Adnan Menderes karena militer memandang Menderes kurang menjalankan sepenuhnya prinsip-prinsip sekulerisme dan juga adanya rumor dalam tubuh angkatan bersenjata tentang pengambilalihan kekuasaan pemerintah oleh kelompok-kelompok tertentu.

Kudeta tersebut berada dibawah kepemimpinan Jenderal



Gursel yang menjanjikan pengembalian dengan cepat pada pemerintahan sipil di bawah sebuah konstitusi baru yang dikerjakan oleh "Committee of National Unity" yaitu komisi yang di dalamnya adalah para ahli dibidangnya.<sup>4)</sup>

## 2. Kudeta Militer II (1970-1973)

Militer kembali campur tangan dalam arena perpolitikan Turki pada awal tahun 1971 yakni pada tanggal 12 Maret dengan keluarnya memorandum yang menghendaki pembentukan suatu pemerintahan baru untuk memulihkan peraturan dan mengimplementasikan pemulihan dalam semangat sekularisme.

Sebagaimana dalam tahun 1960, tindakan yang dilakukan tahun 1971 menciptakan suatu ketegangan pada kesatuan angkatan bersenjata yakni terciptanya rumor tentang intervensi yang lebih ekstrim oleh unsur-unsur yang lebih radikal dalam militer.

Bagaimanapun kebenaran rumor tersebut, pada tanggal 15 Maret 1971 tiga Jenderal dan delapan Kolonel telah dipecat dari angkatan bersenjata karena bersekongkol untuk menentang mekanisme komando hierarki. Dan pada

---

<sup>4)</sup> *Reading In Turkish Politics*, Vol.11, 1987, hal.367

tanggal 7 Juli 1971 delapan orang perwira yang telah pensiun ditangkap dan dituduh bersekongkol menentang negara dan mencoba menggulingkan angkatan bersenjata.<sup>5)</sup>

Tahun 1970-an juga mencerminkan kembali nasionalisme suku Kurdi sebagai Marxist Kurds dengan membentuk Partai Kurdi sayap kiri dan munculnya kembali politik Islam dengan *The Islamist National salvation Party* yang didirikan oleh Necmettin Erbakan dengan memperkenalkan hukum Syariah Islam pada tahun 1972.

### 3. Kudeta Militer III (1980-1983)

Pada tanggal 12 September 1980 militer melakukan kudeta dengan membubarkan parlemen dan mengumumkan keadaan bahaya serta menutup semua partai politik.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kudeta yang dilakukan pada tahun 1980 telah direncanakan secara teknis dan secara ideologi dan memiliki tujuan-tujuan yang jelas.<sup>6)</sup> Awalnya adalah pada September 1979, Jenderal Kenan Evren mempersiapkan sebuah laporan untuk menentukan waktu yang tepat untuk suatu intervensi harus dilakukan.

<sup>5)</sup> *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies*, Vol.XXIV, 2000, hal.53

<sup>6)</sup> *Pakistan Horizon*, Vol.45, 1992, hal. 14



Evren menekankan perhatian militer atas memburuknya situasi keamanan pada sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Fahri Koruturk dan meminta implementasi yang cepat atas berbagai tindakan yang diperlukan. Komando tertinggi dibawah kepala staf Jenderal Kenan Evren tidak hanya berhasil mencegah faksionalisme yang telah menandai tindakan-tindakan sebelumnya, akan tetapi juga berhasil memperlambat intervensi hingga terlihat tidak adanya jalan lain (alternatif). Kudeta militer yang dilakukan mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat Turki.

Pada tanggal 16 September 1980 Evren berjanji untuk kembali kepada peraturan sipil dalam waktu yang tepat. Dalam menentukan waktu yang tepat militer berusaha untuk membangun kembali sistem politik yang sudah kacau, hal ini dapat dilihat dengan pembuatan peraturan baru sebanyak 669 buah dalam usahanya untuk mencegah terjadinya kembali kekacauan seperti pada dekade sebelumnya. Para politikus yang terkenal pada waktu sebelum dilakukannya kudeta dilarang dari semua kegiatan yang berbau politik dan partai-partai mereka ditutup. Junta militer merevisi undang-undang partaipolitik dan mempersiapkan konstitusi baru yang membatasi pluralisme

politik dan kebebasan mengeluarkan pendapat.<sup>7)</sup>

Selama akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an militer Turki masih mengontrol apa yang dipandang sebagai prerogatifnya sendiri, yaitu kebijakan pertahanan dan keamanan. Pada masa ini angkatan bersenjata Turki secara Politik diam. Namun demikian, alasan *low profile*-nya militer selama itu adalah merupakan persepsinya mengenai lingkungan yang nyaman dari pertanggungjawabannya. Kembali pada sebuah aturan politik aktif adalah merupakan respon langsung terhadap apa yang dipandang sebagai munculnya kembali ancaman ganda, yaitu dari nasionalisme Kurdi dan Islam Politik.

Setelah kudeta militer, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Partai Tanah Air (AnaP) yang dipimpin oleh Turgul Ozal, seorang pembuat kebijakan ekonomi dalam pemerintahan sipil terakhir sebelum kudeta militer tahun 1980. Pada masa ini hubungan Turki dengan Barat terutama dengan Amerika Serikat semakin dekat, karena Turgul Ozal mengambil contoh Barat dan Amerika Serikat dalam

---

<sup>7)</sup> [http : //www.cyprus-conflict net / military coup in turkey.htm](http://www.cyprus-conflict.net/military_coup_in_turkey.htm), Akses Tanggal 7 Februari 2002

penerapan ekonominya, yaitu menganjurkan suatu komitmen kuat terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi liberal dan nilai-nilai kultur konservatif.

### C. Tekanan Militer Terhadap Partai Islam

Militer Turki mempunyai legitimasi untuk ikut campur dalam politik, sejauh itu menyangkut pengikisan terhadap prinsip-prinsip Mustafa Kemal dalam konstitusi Turki. Selain itu, legitimasi militer terdapat dalam dua undang-undang utama yang berhubungan dengan status dan pertanggungjawaban legal dari angkatan bersenjata Turki, yaitu *The Turkish Armed Forces internal Service Law* yang dibuat pada tahun 1961 dan *The National Security Council Law* yang dibuat pada tahun 1983 yang mendasari dari tugas-tugas angkatan bersenjata Turki yang tercantum dalam konstitusi Turki 1982.<sup>8)</sup>

Pernyataan yang lebih rinci mengenai peranan dan kewajiban resmi militer dimuat dalam *Turkish Armed Forces Internal Service Law*, yang secara spesifik meminta militer untuk bertanggung jawab melindungi sifat rezim

---

<sup>8)</sup> Gareth Jenkins, *Context and Circumstance : The Turkish and Politics*, Adelphi Paper No. 337, Oxford University Press, Februari 2001, hal. 42

Turki, termasuk prinsip-prinsip. Kemalis, mengenai integritas teritorial, sekulerisme, dan republikanisme. Pasal 35 menyatakan: "Tugas angkatan bersenjata Turki adalah melindungi dan menjaga tanah air Turki dan Republik Turki sebagaimana yang ditentukan dalam konstitusi".

*The Turkish Armed Forces Internal Service Law* kaum militer bahkan lebih eksplisit memberikan penjelasan mengenai metode-metode yang digunakan untuk melindungi dan menjaga, dan mengenai tugas militer untuk menghalau segala ancaman yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri.<sup>9)</sup> Pasal 85 ayat 1 dari direktif tersebut menyatakan:

"Adalah kewajiban Angkatan Bersenjata Turki untuk melindungi tanah air dan Republik Turki terhadap segala ancaman internal dan eksternal".

Ini menjelaskan bahwa militer Turki benar-benar mempunyai kekuatan hukum untuk mencegah dan menekan ancaman-ancaman baik dari dalam maupun dari luar.

---

<sup>9)</sup> *Ibid*, hal. 45



Menurut pasal 118 Konstitusi Turki 1982, angkatan bersenjata Turki memberi lima dari sepuluh anggota National Security Council (NSC), yang secara teoritis berfungsi sebagai badan penasehat bagi pemerintah sipil mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan keamanan.

Para anggota NSC adalah Perdana Menteri, para menteri pertahanan nasional, urusan internal, urusan luar negeri, kepala staf umum, para komandan angkatan darat, laut, udara dan gendarmerie, yang diketuai oleh Presiden. Berbagai pertemuan dilaksanakan sekali sebulan dalam waktu dan tempat yang ditentukan oleh Presiden berdasarkan konsultasi dengan para anggota NSC.

*The National Security Council Law* mendefinisikan keamanan nasional dalam istilah-istilah yang lebih luas dan diinterpretasikan sebagai yang meliputi hampir setiap bidang kebijakan, yaitu keamanan nasional berafti pertahanan dan perlindungan negara terhadap setiap jenis ancaman eksternal dan internal, terhadap ketentuan konstitusional, eksistensi nasional, kesatuan, dan terhadap semua hak-hak kontraktualnya dalam arena internasional termasuk dalam bidang politik, sosial,



kebudayaan dan ekonomi.

#### **D. Tindakan Militer Turki Dalam Menekan Partai Islam**

2007 Peningkatan yang cepat dalam dukungan pemilih dan pemilihan umum untuk Partai Islam selama tahun 1980-an dan 1990-an terlihat sebagai akibat dari kombinasi beberapa faktor yang berbeda, yang terdiri dari fenomena global seperti kebangkitan Islam dan kevakuman ideologi yang ditinggalkan oleh keruntuhan komunisme, dan berbagai faktor lokal. Faktor-faktor lokal yang dimaksud meliputi: perubahan demografi dan sosial seperti urbanisasi yang cepat, tingkat literasi yang lebih tinggi dan keterbukaan pada media massa, pengenalan pendidikan keagamaan ke dalam sekolah-sekolah.

Pembentukan WWG (*The Western Working Group*) oleh NSC<sup>10)</sup>, bertujuan untuk membasmi fundamentalisme Islam dibawah ketentuan komando tertinggi Angkatan Laut (*The Naval High Command*). Tugas-tugasnya meliputi pemantauan tidak hanya kelompok-kelompok ekstrim garis keras akan tetapi juga pembentuk media Islamis, organisasi dan pendidikan, serta mengidentifikasikan para simpatisan

---

<sup>10)</sup> *Ibid*, hal. 50

Islamis dalam birokrasi pusat dan daerah, organisasi buruh dan kesatuan dagang. Pada bulan Juni 1999 WWG memberikan laporan mengenai aktivitas anti sekuler yang dinyatakan oleh kelompok Futulleh Gulen kepada NSC, melalui siaran televisi Turki kelompok Futulleh Gulen memberikan instruksi kepada para pengikutnya untuk memasuki layanan sipil dan bertahan di sana hingga mereka cukup kuat untuk memperkenalkan hukum Syariah.

Pada bulan Februari 1996, kepala staf Jenderal Hakki Karadayi memperingatkan pelaksana Perdana Menteri Tanzu Ciller dari Partai Jalan Kebenaran terhadap pembentukan koalisi dengan Partai Refah. Pada bulan Juni 1996, Partai Jalan Kebenaran membentuk koalisi dengan Partai Refah, dan Necmettin Erbakan menjadi Perdana Menteri pertama Turki yang berasal dari partai yang betul-betul memperjuangkan Islam.<sup>11)</sup>

Selama enam bulan pertama koalisi Partai Refah-Partai Jalan kebenaran, militer mengulur waktunya dengan terus mengeluarkan berbagai pernyataan yang memperkuat komitmennya terhadap sekulerisme sambil terus mengawasi tindakan-tindakan pemerintah. Dalam hal ini militer

---

<sup>11)</sup> *SuaraMerdeka*, 27 Agustus 1996



didukung oleh sikap hati-hati yang diadopsi dalam kepemimpinan Erbakan yang secara hati-hati menghindari untuk memperkenalkan berbagai inisiatif kebijakan radikal, setidaknya bukan karena militer mengetahui bahwa masih kurang cukup dukungan pemilihan untuk mampu menghadapi tantangan untuk sekuler.

Pada tanggal 22-24 Januari 1997 para komandan angkatan bersenjata mengadakan pertemuan di dasar Laut Golcuk di laut Marmara dimana mereka membicarakan apa yang mereka anggap sebagai awal pengikisan sekularisme dan suatu kecondongan terhadap fundamentalisme, di mana sebuah kelompok tertentu telah dipromosikan secara aktif sementara kelompok-kelompok lainnya diabaikan. Militer menganggap Erbakan sebagai seorang yang berbahaya, yaitu berjanji setia kepada sistem demokrasi sekuler ketika posisinya lemah, dan ketika menguat ia mulai memainkan sentimen Islam untuk mengubah sistem politik Turki ke arah negara Islam.<sup>12)</sup>

Pada pertemuan NSC tanggal 28 Februari 1997, militer memberikan sebuah daftar dari 18 gerakan anti-Islam kepada pemerintah. Topik daftar tersebut adalah

<sup>12)</sup> *Kompas*, 15 Mei 1997



sebuah usulan untuk memperluas kewajiban pendidikan lanjutan dari lima tahun menjadi delapan tahun. Tujuannya adalah untuk meniadakan bagian sekolah tingkat menengah dari sekolah-sekolah kejuruan, yang diyakini militer telah digunakan untuk menanamkan nilai-nilai anti sekularisme<sup>13)</sup>, namun yang terpenting di dalamnya antara lain adalah memberhentikan pejabat dari kalangan Islam garis keras di kantor-kantor pemerintahan dan menghentikan siaran mengenai syariah di media elektronik milik Partai Refah.

Pertemuan NSC berlangsung selama sembilan jam. Setelah dilakukan berbagai pembicaraan, Erbakan akhirnya menyetujui untuk menandatangani deklarasi NSC yang mengusulkan agar 18 kegiatan yang disetujui disampaikan kepada Dewan Menteri. Pada tanggal 14 Maret 1997 kegiatan tersebut telah disetujui oleh parlemen. Konflik antara Partai Islam dengan militer sebenarnya telah berlangsung lama di mana pada tahun 1972 Erbakan mendirikan Partai Keselamatan Nasional (*National Salvation Party*) setelah keluar dari Partai Keadilan (*Justice Party*) yang dipimpin oleh Suleyman Demirel.

---

<sup>13)</sup> <http://www.muslimmedia.april-1-15-1997/articles.html>, Akses Tanggal 11 April 2000



Dengan partainya yang baru itu, Erbakan dan teman-temannya di dalam partai menghendaki dihidupkannya kembali "warisan nasional Turki" seperti pada kebesaran di zaman Dinasti Ustmani dengan nilai-nilai moral yang mendasarinya yakni Islam. Namun partai ini ditutup setelah terjadinya kudeta tahun 1980.

Konflik Refah-militer membawa Turki pada konsekuensi yang lebih serius yaitu akan menjauhkan Turki dari kemungkinan mendapatkan keanggotaan dalam Uni Eropa. Selama ini, penolakan Uni Eropa terhadap keanggotaan Turki adalah bahwa Turki belum menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan kriteria para anggota Uni Eropa selain penerapan HAM yang berkaitan dengan kebijakan Turki terhadap suku Kurdi.

Pada tanggal 22 Mei 1997 Jaksa Penuntut Umum menggunakan *Constitutional Court* untuk menutup Partai Refah dengan alasan bahwa Partai Refah berusaha menghancurkan konstitusi. Partai Refah akhirnya ditutup pada tanggal 16 Januari 1998 dan pemimpinnya, Necmettin Erbakan dihukum selama lima tahun.<sup>14)</sup> Akhirnya pemerintahan koalisi Refah-Partai Jalan Kebenaran

---

<sup>14)</sup> *The Jakarta Post*, 19 Januari 1998.



berhenti pada tanggal 18 Juni. Pemerintahan itu digantikan oleh koalisi tiga partai antara *Motherland Party (MP)*, *The Democratic Left Party (DLP)*, dan *The Democratic Turkey Party (DTP)*, yang telah terbentuk dari para anggota Partai Jalan Kebenaran dengan pimpinan *Motherland Party*, Mesut Yilmaz sebagai Perdana Menteri. Meskipun telah dicapai tujuan utamanya dengan merobohkan koalisi pimpinan Partai Refah, militer masih merasa enggan mempercayakan perlindungan sekularisme pada pemerintah, dengan menyatakan bahwa hal itu merupakan kegagalan dari pemerintah terdahulu untuk membatasi gerakan Islam Turki yang telah memungkinkan Partai Refah berkuasa.

Hubungan antara Yilmaz dan militer masih tegang sepanjang tahun 1997-1998. Pada bulan Februari 1998, Recai Kutan Menteri Energi, pada kabinet Erbakan, dan Walikota Istanbul Recep Tayyib, membentuk sebuah partai baru bernama Partai Fadilah (*Virtue Party*) yang berorientasi Islam,<sup>15)</sup> yang sebenarnya merupakan penerus Partai Refah. Pembentukan partai inilah yang membuat ketegangan Yilmaz dengan militer meluas ke dalam sebuah

---

<sup>15)</sup> *The Jakarta Post*, 23 Februari 1998

konfrontasi langsung pada bulan Maret 1998 ketika Yilmaz kembali menyatakan bahwa pembasmian fundamentalisme adalah kewajiban dari pemerintah.<sup>16)</sup>

Untuk menanggapi hal ini, para kepala staf Turki mengeluarkan suatu pernyataan peringatan bahwa: "tidak seorangpun, apapun kedudukannya, dapat menyarankan Angkatan Bersenjata Turki berjuang menentang separatisme dan aktivitas gerakan Islam".<sup>16)</sup> Pada bulan Juni 1998, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki telah memecat lebih dari 160 personil militernya karena diduga keras merupakan simpatisan dari aktivis Islam dan saat itu juga para petinggi militer mengundang Yilmaz untuk membicarakan tindakan-tindakan yang efektif dalam menghadapi aktivis-aktivis Islam.<sup>17)</sup>

Puncak tekanan militer terhadap Partai Islam adalah setelah pemilihan umum bulan April 1999 dengan menangnya DSP (*Democratic Sol Party*) pimpinan Bulent cevit dengan 21,71 persen suara atau 136 kursi parlemen, mendahului Partai Aksi Demokrasi (MHP) pimpinan Deviet Bahcell dengan 18,3 persen suara atau 128 kursi parlemen,

<sup>16)</sup> *Suara Pembaharuan*, 21 Maret 1998

<sup>17)</sup> [http://www.bbc.news/world/europe/turkey/islamist\\_purge\\_in\\_turkish\\_militaryhtm](http://www.bbc.news/world/europe/turkey/islamist_purge_in_turkish_militaryhtm),  
Akses Tanggal 121 Februari 2002

kemudian Partai Fadilah pimpinan Recai Kutan dengan 15,41 suara atau 102 kursi parlemen, dan yang terakhir adalah Partai Tanah Air (AnaP) dengan 12 persen suara atau 86 kursi parlemen.<sup>18)</sup>

Selanjutnya pada bulan Mei 1999 DLP membentuk koalisi dengan MHP dan AnaP, yang dikepalai oleh Ecevit sebagai Perdana Menteri. Namun jauh sebelumnya Partai Fadilah yang merupakan peraih suara terbanyak ketiga meminta agar mereka juga ikut bertugas dalam pemerintahan. Namun mereka mendapatkan tantangan keras dari militer sehingga akhirnya mereka menjadi partai oposisi.

Pada bulan Mei 2000, Parlemen Turki melantik presiden ke-10 Turki, yang terpilih adalah Ahmed Necdet Sezer menggantikan Suleyman Demirel. Sezer dalam pidato pelantikannya menyatakan bahwa prinsip sekularisme akan dilindungi dengan ketegasan dan tanpa pengecualian apapun.<sup>20)</sup> Petinggi-petinggi militer merasa mendapat angin segar kembali setelah Uni Eropa meminta mereka keluar dari panggung politik untuk mendapat menjadi anggota Uni Eropa.

<sup>18)</sup> Kompas, 26 Juni 2001  
<sup>20)</sup> [http://www.ahd.org/turkey/ata\\_Akser\\_Tanggal 5 Februari 2002](http://www.ahd.org/turkey/ata_Akser_Tanggal%205%20Februari%202002)  
 20) [Republika](http://www.republika.co.id), 26 Mei 2000

Tabel Hasil Pemilihan Umum 18 April 1999.<sup>19)</sup>

| <b>Nama Partai</b>           | <b>Kursi Parlemen</b> | <b>Dalam Persen</b> |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Partai Demokratik Kiri (DSP) | 136                   | 22,3 %              |
| Partai AksiDemok rasi (MHP)  | 129                   | 18,9 %              |
| PartaiFadi lah               | 114                   | 15,5 %              |
| Partai Tanah Air (AnaP)      | 86                    | 13,3 %              |
| Partai Jalan Kebenaran (DYP) | 85                    | 12,4 %              |
| Non Partisan                 | 3                     |                     |
| <b>Total</b>                 | <b>550</b>            |                     |

Pada bulan Mei 2000 Parlemen Turki melantik presiden ke-10 Turki, yang terpilih adalah Ahmed Necdet Sezer menggantikan Suleyman Demirel. Sezer dalam pidato pelantikannya menyatakan bahwa prinsip sekulerisme akan dilindungi dengan ketegasan dan tanpa kelonggaran apapun.<sup>20)</sup> Petinggi-petinggi militer merasa mendapat angin segar kembali setelah Uni Eropa meminta mereka keluar dari panggung politik untuk mendapat menjadi anggota Uni Eropa.

<sup>19)</sup> <http://www.election.world.org/turkey.htm>, Akses Tanggal 5 Februari 2002

<sup>20)</sup> *Republika*, 26 Mei 2000

Pada bulan Oktober, Partai Fadilah diajukan ke Mahkamah Konstitusi Turki oleh NSC dengan alasan yang sama dengan penutupan Partai Refah.<sup>21)</sup> Setelah melakukan berbagai sidang, Partai Fadilah dilarang melakukan aktivitas politik oleh Mahkamah Konstitusi Turki pada bulan Juni 2001.<sup>22)</sup> Hilangnya Partai Islam Fadilah dari pentas politik Turki memperpanjang catatan sejarah Partai Islam di Turki yang dilarang melakukan aktivitas politik hingga penutupannya, dua partai sebelumnya yang ditutup adalah Partai Penyelamat Nasional yang dipimpin oleh Erbakan pada awal tahun 1980-an dan Partai Refah yang juga dipimpin oleh Erbakan pada tahun 1998.

## **E. Beberapa Alasan Militer Turki Menekan Partai Islam**

### **1. Kestabilan Politik di Turki**

Alasan militer dalam mencampuri urusan politik khususnya tekanan pada Partai Islam adalah untuk menjaga stabilitas politik di Turki. Stabilitas politik diartikan dengan kegiatan politik yang berjalan tidak diusik dengan gerakan-gerakan sosial yang terpecah belah dengan adanya kelompok-kelompok kepentingan dan partai

---

<sup>21)</sup> *Republika*, 13 Oktober 2000 <sup>22)</sup> *Kompas*, 26 Juni 2001

<sup>22)</sup> *Kompas*, 26 Juni 2001



politik yang pada akhirnya mengakibatkan kekacauan politik. Tujuan dari stabilitas politik ini adalah agar memudahkan Turki menjadi anggota Uni Eropa. Tekanan yang dilakukan oleh pihak militer terhadap Partai Fadilah dimaksudkan agar Turki terhindar dari kemelut politik karena Turki tengah mengejar momentum penting untuk reformasi ekonomi.

## 2. Mempertahankan ideologi sekuler

Ideologi sekuler mulai dikenal di Turki ketika Sultan Selim III dari Dinasti Osmaniyyah melakukan pembaharuan-pembaharuan ala Barat setelah penaklukan Konstantinopel tahun 1453. Sultan selim III dan pengganti-penggantinya melaksanakan pembaharuan-pembaharuan Barat untuk memberikan nafas baru pada kehidupan Imperium Osmaniyyah yang sedang dalam kemunduran.

Terjadinya Revolusi Turki tahun 1909 merupakan suatu reaksi terhadap otoritas-otoritas agama yang mempergunakan pengaruh mereka terhadap masalah masalah politik untuk kebesaran diri sendiri, kepentingan pribadi, dan melawan semua usaha ke arah modernisasi.



Sekulerisme dan pem-Barat-an adalah saling terkait, sekulerisme digunakan sebagai alat untuk memperoleh pem-Barat-an. Sekulerisme diambil sebagai prinsip politik negara oleh rezim Kemalis pada puncak gerakan pem-Barat-an pada tahun 1920-an. Ideologi sekuler yang ditanamkan dan dimasukkan ke dalam konstitusi Turki oleh Mustafa Kemal Attaturk telah menjadi dasar hukum bagi militer untuk menekan partai Islam.

Ada dua kepentingan militer di dalam sekulerisme, yaitu: *Pertama*, militer merasa khawatir akan kehilangan akses kekuasaan politiknya, dan *kedua*, juga takut akan kehilangan akses ekonomi jika politik Islam dibiarkan berkembang di Turki.<sup>23)</sup> Tantangan terberat dari Partai Islam adalah batasan konstitusi. Militer Turki menjadi tembok besar yang bisa mengacaukan segala skenario hanya dengan pernyataannya bahwa sebuah partai melanggar konsensus untuk menegakkan sekulerisme.

### 3. Upaya Mengalangi Kebangkitan Islam di Turki

Kebangkitan kembali Islam di Turki pada tahun-tahun terakhir ini telah menarik perhatian beberapa pengamat

---

<sup>23)</sup> *Suara Hidayatullah*, 03/XJuli 1997



Barat. Para pengamat Barat itu melihat bahwa kebangkitan kembali Islam akan membawa masyarakat Turki pada kebangkitan fanatisme. Jika hal yang sedemikian itu berkembang maka hal itu akan berakibat pada penghapusan banyak kerja yang telah dilaksanakan oleh pembaharu-pembaharu Turki lebih dari satu abad yang lalu.

Kaum sekularis selalu mempertahankan bahwa penggunaan ideologi sekuler tidaklah berarti bahwa bangsa Turki meninggalkan Islam. Sekulerisme merupakan alat pelindung terhadap bangkitnya kembali fanatisme dan tindakan reaksioner. Politik agresif akan terus dilakukan selama masih ada kemungkinan adanya kebangkitan itu. Kaum sekularis berpendapat bahwa kebangkitan kembali Islam di Turki sebagian besar adalah pekerjaan kaum reaksioner. Untuk mendukung tujuan mereka, mereka mengambil contoh kerusuhan yang ditimbulkan oleh golongan fanatik seperti penghancuran patung-patung Attaturk dan penghidupan kembali tarikattarikat tasawuf.

Kebangkitan kembali Islam di Turki yang ditandai dengan menangnya Partai Refah pimpinan Necmettin Erbakan yang berorientasi Islam telah memberi keyakinan pada militer bahwa sejumlah 'muslim' fanatik akan

mengembalikan Turki kepada apa yang dipandang sebagai rezim teokrasi seperti pada zaman kejayaan Islam Ottoman sehingga militer merasa sangat berkewajiban untuk mencegah semakin besarnya dukungan yang akan diterima oleh Partai Refah.

#### **F. Hubungan Amerika Serikat dan Turki**

Berakhirnya Perang Dunia II, Turki mempunyai makna strategis bagi kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, kawasan Balkan, dan Eropa. Tergabungnya Turki ke dalam NATO telah memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat, karena Turki dalam hal ini berperan sebagai salah satu dari garis pertama pertahanan terhadap Uni Soviet.

Selain itu, Turki juga berperan sebagai gerbang bagi Amerika Serikat ke dunia Muslim. Aliansi NATO merupakan penghubung penting institusional dan psikologis Turki dengan Barat, termasuk upaya untuk menjadi anagota penuh Uni Eropa. Terjadinya Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979, beserta invasi Soviet atas Afganistan, semakin meningkatkan arti penting Turki sebagai aset strategis bagi Amerika Serikat. Makna penting strategis Turki dilihat Amerika Serikat sebagai mutlak tak tergantikan dan patut didukung. Dukungan Amerika Serikat



pada Turki terlihat jelas dalam pinjaman-pinjaman yang sudah dijanjikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Antara tahun 1980-1987, Turki menerima US\$ 13 miliar dan menikmati tingkat pertumbuhan hampir 5 persen pada tahun-tahun itu.

Departemen Perdagangan Amerika Serikat menempatkan Turki sebagai salah satu dari 10 pasar besar dunia yang pertumbuhannya paling subur.<sup>24)</sup> Dalam hal ini, Turki menyediakan pasar besar bagi barang-barang Amerika Serikat dan merupakan saluran investasi serta gerbang utama ke pasar di Negara-negara Timur Tengah.

Perang Teluk telah mempererat dan mengonsolidasikan hubungan Amerika Serikat-Turki. Turki menjadi mitra Amerika dalam kebijakan-kebijakan regionalnya. Krisis Teluk tahun 1990 memberi Turki peluang untuk mempererat hubungan dengan Amerika Serikat. Presiden Turki, Ozal, pada waktu itu) ingin membuat Amerika Serikat berutang budi pada Turki, suatu sasaran yang dalam pandangannya sangat penting bagi pembangunan

---

<sup>24)</sup> Turkey: The Emerging Market Bridging East and West, Foreign Affairs 75 No 3, Mei/Juni 1996



ekonomi dan teknologi Turki, dan juga bagi modernisasi angkatan bersenjata Turki. Amerika Serikat pun sepakat bahwa Turki harus memainkan peran penting dalam proses perdamaian Arab-Israel.

Turki di masa Ozal mendukung sanksi-sanksi PBB terhadap Irak, menyumbat pipa yang mengalirkan 1,5 juta barel minyak perhari, mengizinkan pesawat-pesawat tempur pasukan koalisi untuk menjalankan misi penyerangan dsri pangkalan-pangkalan di Turki, kemudian memobilisasi tentara ke perbatasan utara Irak, dan mengizinkan kehadiran serdadu-serdadu asing di tanah Turki. Proses perdamaian Arab-Israel, disertai perubahan-perubahan lainnya dalam politik Timur Tengah, membukakan peluang kebijakan luar negeri baru bagi Turki. Untuk mempererat hubungannya dengan Amerika Serikat, Turki pun berusaha mempererat hubungannya dengan Isarael.

G. Re Sejumlah perjanjian militer di tanda tangani, guna mengatur koordinasi antara pasukan udara dan laut kedua Negara. Angkatan Laut Amerika Serikat ikut ambil bagian dalam latihan-latihan gabungan pasukan laut Turki-Israel.

terlihat pada fakta bahwa para pejabat Amerika Serikat

<sup>25</sup> Washington Post, 16 April 1996

<sup>26</sup> New York Times, 29 Maret 1993



<sup>25)</sup>Jenderal-jenderal turki ingin berguna bagi Amerika Serikat, dan kartu Israel tampak sebagai jalan yang paling aman untuk memikat aparat kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Sebagai imbalannya, Amerika Serikat dengan gigih melobi Masyarakat Eropa untuk menerima Turki ke dalam kelompok eksklusif ini; mendukung keras kampanye berdarah Turki terhadap Partai Buruh Kurdistan; mengesampingkan pelanggaran-pelanggaran HAM Turki; memasok Ankara dengan senjata, dan memperlihatkan pengertian yang lapang dada atas pendudukan 22 tahun tentara Turki terhadap Cyprus Utara. Pembuat kebijakan Amerika Serikat tetap tak bergeming oleh imbauan imbauan para anggota kongres untuk mengutuk Turki karena meningkatkan perangnya terhadap etnis Kurdi.<sup>26)</sup>

#### **G. Kemenangan Partai Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kepentingan Amerika Serikat di Turki**

Sudah sejak akhir 1940-an, Amerika Serikat menanamkan pengaruh besar di Turki. Makna penting Turki terletak pada fakta bahwa para pejabat Amerika Serikat

<sup>25)</sup> *Washington Post*, 16 April 1996

<sup>26)</sup> *New York Times*, 29 Maret 1995



sering merujuknya sebagai sebuah model bagi koeksistensi antara dunia Islam dan Barat. Selain itu, Turki adalah peran stabilisator yang mutlak diperlukan Amerika Serikat dalam sebuah wilayah yang amat sensitif seperti Timur Tengah. Secara khusus, Amerika Serikat menyebut Turki sebagai sebuah model demokrasi sekuler yang bisa mempengaruhi republik-republik bekas Soviet yang mayoritas berpenduduk Muslim. Dan yang lebih penting, bagi Amerika Serikat, sekulerisme Turki sangat diperlukan untuk membendung gelombang pasang fundamentalisme.

Kemenangan Partai Refah pada tahun 1995 memunculkan keprihatinan besar bagi Amerika Serikat. Hal tersebut jelas sangat mempengaruhi kepentingan Amerika Serikat di Turki. Dengan kemenangan Partai Islam Refah, Amerika Serikat khawatir Turki dapat menjadi ancaman dan mungkin suatu hari akan berubah menjadi seperti Iran atau Aljazair. Sejak berkuasanya kaum Islamis pada tahun 1996, Amerika Serikat mencoba melakukan pendekatan-pendekatan yang sangat hati-hati. Kekhawatiran dan kecemasan, terhadap pemerintahan Islamis akan dapat mempengaruhi kepentingan-kepentingan politis dan keamanan, tetap mewarnai pandangan para elit kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Elit sekuler Turki berupaya memanipulasi ketakutan Amerika Serikat terhadap militansi Islam dengan menggambarkan negeri itu sebagai kantong stabilitas di sebuah lingkungan yang rawan. Mereka terus menjustifikasi makna penting Ankara bagi Amerika Serikat dalam posisi sebagai pengaruh yang kokoh atas kawasan itu yang dapat dikerahkan untuk memukul radikal religius.

Dari segi regional, sekutu-sekutu Timur Tengah pro Amerika Serikat, yang terus diserang oleh kekuatan-kekuatan oposisi Islamis, khawatir bahwa Erbakan, dengan membuktikan 'bahwa Islamisme tak perlu diidentikkan dengan militansi, akan memberikan gerakangerakan Islam penghormaan baru di kalangan kelas menengah mereka dan di Barat. Secara khusus, Israel dan kawan-kawan Amerikanya mengkhawatirkan Erbakan, mengingat pernyataan dia sebelumnya yang anti Israel, akan berbalik mangakhiri kerjasama keamanan yang erat antara Tel Aviv dan Ankara yang sudah mulai sejak awal 1990-an.

Presiden Mubarak juga khawatir bahwa hubungan erat Refah dengan Ikhwanul Muslimin Mesir akan memperkuat oposisi Islamis di Kairo. Para sekutu Timur Tengah Amerika Serikat mengungkapkan pandanganpandangan yang gambling kepada rekan-rekan mereka di Amerika Serikat



untuk memberi kesan pada Washington tentang perlunya menentang Islamis Erbakan.

Pandangan-pandangan dan kepentingan di ketiga kubu, Sekularis Attaturkis, sebagian rezim Timur Tengah, dan kaum konfrontasionalis Barat itu mewakili sebuah koalisi kuat yang melobi Amerika Serikat untuk menjaga jarak dari dan menerapkan tekanan terhadap pemerintahan Erbakan. Koalisi ini berperan penting dalam memperkuat dan merangsang semangat militer Turki untuk menyingkirkan Erbakan dari kekuasaan. Amerika Serikat tahu bahwa militer Turki dapat diandalkan untuk membungkam kaum Islamis, setidaknya dapat menjaga dan mengontrol pemerintahan Erbakan, sepanjang militer Turki tidak sampai melancarkan kudeta.

#### A. Respon AS Terhadap Kemungkinan Partai Islam di Turki

Secara keseluruhan, kecurigaan dan kecemasan mewarnai persepsi dan pandangan Amerika terhadap ideologi dan kebijakan Refah, terutama ketika Erbakan tampak menentang kepentingan-kepentingan keamanan Amerika Serikat di Teluk Persia dan Timur Tengah.

Kendati demikian, para pejabat Amerika Serikat tidak membiarkan kecemasan ini sampai mengganggu dan merusak hubungan sekutu mereka di NATO ini. Patut pula dipuji bahwa mereka mau belajar bagaimana hidup bekerjasama dengan membentuk sebuah pemerintahan



berdampingan dengan pemerintahan pimpinan Refah dengan memprakarsai dialog tingkat tinggi dengan Ankara. Pendekatan Amerika Serikat terhadap Islamis Turki ditandai dengan akomodasi, bukan konfrontasi. Hasilnya, Amerika Serikat dan pemerintahan Erbakan sama-sama menghindari perang kata dan juga mempertahankan hubungan yang tepat. Dalam arti ini, dan sebagai langkah pertama, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Refah mungkin bisa dijadikan model untuk diterapkan pada kasus-kasus lain di mana kaum Islamis berpartisipasi dalam proses politik.

#### **H. Respon AS Terhadap Kemenangan Partai Islam di Turki**

Pemilu bulan Desember 1995, untuk pertama kalinya dalam sejarah moderen Turki, golongan Islamis, sebagaimana yang diwakili oleh Partai Refah meraih kemenangan ketika mereka menangkan lebih dari 21 persen suara rakyat dan 158 kursi dari 550 kursi yang ada di Majelis Nasional. Semula, dua partai sekuler terbesar yakni Partai Tanah Air dan Partai Jalan Sejati, karena ditekan oleh militer, tidak mau memberi Refah buah kemenangannya dengan membentuk sebuah pemerintahan

koalisi minoritas. Tapi setelah tiga bulan terjadi kelumpuhan politik, kawin paksa antara kedua pemimpin partai tersebut, masing-masing Mesut Yilmaz dan Tansu Ciller, ambruk pada Juni 1996, membukakan jalan bagi Refah guna membentuk pemerintahan gabungan bersama Partai Kemenangan Partai Refah memunculkan Jalan Sejati. Pemimpin Refah Necmettin Erbakan akhirnya bisa menduduki kursi Perdana Menteri.

Kemenangan partai refah memunculkan keperihatinan besar di Amerika Serikat, sementara revolusi Islam Iran masih meninggalkan bekas bagi Amerika Serikat. Para petinggi Amerika Serikat bimbang bagaimana mereaksi gelombang Islamis di Turki. Semula, ketidakpastian, kegelisahan, dan keraguan yang amat tinggi mewarnai pandangan Amerika Serikat terhadap Refah. Ambivalensi dan ketegangan ini untuk sebagian menjelaskan mengapa para petinggi Amerika Serikat sangat hati-hati dalam respon mereka terhadap kemenangan Partai Refah dan terhadap terbentuknya pemerintahan berbasis Islamis setahun kemudian. Sebagian pejabat dalam pemerintahan Clinton diam-diam berharap pemerintahan Partai Refah itu gagal, sehingga memojokkan kaum fundamentalis dan memungkinkan

Ciller memunguti serpihan-serpihannya.<sup>27)</sup>

Tak seperti reaksi mereka terhadap situasi di Iran dan Aljazair, para pembuat kebijakan Amerika Serikat tidak panik. Washington bersikap menunggu dan menempuh pendekatan pragmatis terhadap kehadiran Refah di pentas kekuasaan.

Hal tersebut tampak jelas seperti yang dipaparkan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri, Nicholas Burns pada waktu, yang menyatakan bahwa Washington akan "mendengarkan retorik dan juga menyaksikan tindakan-tindakan" dari pemerintahan Refah.<sup>28)</sup> Dalam hal ini, dengan sedikit mengabaikan saran sebagian pejabat pelaksana Departemen Luar Negeri, pemerintahan Clinton telah menugaskan Peter Tarnoff, waktu itu Menteri Muda Luar Negeri, untuk menemui perdana menteri yang baru terpilih, Erbakan, dan dengan demikian Amerika Serikat jelas telah memberi restu pada Erbakan beberapa saat sebelum Parlemen Turki sendiri memberinya mandat.

Tarnoff mengatakan pada Erbakan bahwa Amerika Serikat ingin bekerja sama dengannya sepanjang dia

---

<sup>27)</sup> *Washington Post*, 11 Juli 1996

<sup>28)</sup> *Turkey Daily News*, 10 Juli 1996

menghormati kepentingan-kepentingan keamanan Amerika Serikat di kawasan itu. Pernyataan Tarnoff itu mempunyai makna penting karena ia mengungkapkan kebimbangan Washington terhadap pemerintahan berbasis Islamis tersebut. Ia juga menunjukkan seberapa jauh Amerika Serikat bersedia menoleransi dan hidup berdampingan dengan Islamis sepanjang orientasi kebijakan luar negerinya tidak membahayakan kepentingan-kepentingan keamanan Amerika Serikat.

Pada bulan Agustus 1996, Erbakan membikin kaget Washington dengan mengunjungi Iran, berlawanan dengan peringatan Amerika Serikat, hanya beberapa hari setelah Clinton menandatangani Undang-undang Anti Terorisme guna mencegah perusahaan-perusahaan asing berinvestasi lebih dari US\$ 40 juta setahun dalam sektor minyak dan gas di Iran. Erbakan juga menandatangani transaksi gas senilai US\$ 23 miliar dengan Teheran.<sup>29)</sup> Begitu juga dengan kunjungannya pada bulan Oktober ke Libya, yang nyaris memecah belah koalisi kekuasaannya.

Amerika Serikat mengungkapkan kerisauan yang sangat serius terhadap kedekatan Turki dengan Iran dan Libya.

---

<sup>29)</sup> *Washington Report on Middle Eastern Affairs*, Oktober 1996, hal.28